Kernel for Word to PDF Demo

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

Kernel for Word to PDF Demo

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

Kernel for Word to PDF Demo

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Kernel for Word to PDF Demo

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

Kernel for Word to PDF Demo

(1). Sub Bagian Tata Usaha; (2). Seksi Pajak; (3). Seksi Retribusi; (4). Seksi IPEDA; (5). Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan; (6).UPTD Pasar; (7). UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah) . Dengan sistem MAPENDA, petugas

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi "*door to door*".

Kernel for Word to PDF Demo

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II,

Kernel for Word to PDF Demo

yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kernel for Word to PDF Demo

Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta

Kernel for Word to PDF Demo

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur

Kernel for Word to PDF Demo

Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat IIseluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual

Kernel for Word to PDF Demo

Pendapatan Daerah) .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara "*door to door*" menjadi "*self*

Kernel for Word to PDF Demo

assesment" yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pelayanan Pajak.

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

Dispenda Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdsarkan visi dan misi Dispenda Kota Bandung.Visi dan misi Disyanjak Kota Bandung merupakan pedoman kerja para aparatur Disyanjak Kota Bandung. Adapun bunyi tertulis dari tugas pokok dan fungsi Disyanjak Kota Bandung sebagai berikut:

Kernel for Word to PDF Demo

Visi

"Profesional dalam Pengelolaan pendapatan, Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)".

Kernel for Word to PDF Demo

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci, sebagai berikut :

Kernel for Word to PDF Demo

1. Profesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi : kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

Kernel for Word to PDF Demo

2. Pengelolaan Pendapatan yaitu sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-undang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri :

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

Kernel for Word to PDF Demo

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

Kernel for Word to PDF Demo

f. Pajak Parkir

g. Pajak Air Tanah

h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Kernel for Word to PDF Demo

i. Pajak Atas Bea Perolehan dan Hak Tanah dan Bangunan

3. Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kernel for Word to PDF Demo

Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah:

Kernel for Word to PDF Demo

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak daerah.

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

Misi Pertama merupakan Implementasi Visi mengenai Sumber Daya yang Profesional yang ditetapkan Dinas Pendapatan dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Misi Kedua merupakan Implementasi Visi Pengelolaan PendapatanAsli Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan melalui tersusunnya Peraturan Normatif yang mengatur tentang Pendapatan Asli Daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

2.2 Stuktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Setiap Kantor mempunyai struktur organisasi Kantor yang berbeda-beda. Perbedaan ini tergantung kepada perusahaan tersebut yang disesuaikan dengan kegiatan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan Disyanjak yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Dinas memawahi berbagai bidang seperti ;
   a. Bidang Perencanaan;
   b. Bidang Pajak Pendaftaran;
   c. Bidang Pajak Penetapan;
   d. Bidang Pengendalian.

Kernel for Word to PDF Demo

2. Sekretaris membawahi yang terdiri dari ;
    a. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian;
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
    c. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran.
3. Bidang Perencanaan membawahi seksi – seksi,diantaranya;
    a. Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
    b. Seksi Data dan Potensi Pajak;
    c. Seksi Analisa dan Laporan;
4. Bidang Pajak Pendaftaran membawahi seksi – seksi,diantaranya;
    a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
    b. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;
    c. Seksi Penyelesaian Piutang.
5. Bidang Pajak Penetapan membawahi seksi – seksi,diantaranya;
    a. Seksi Penilaian dan Pengaduan;
    b. Seksi Penetapan dan Pembukuan;
    c. Seksi Penagihan.
6. Bidang Pengendalian membawahi seksi – seksi,diantaranya;
    a. Seksi Penyuluhan;
    b. Seksi Pengawasan;
    c. Seksi Penindakan.

Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo
Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan yang berlangsung, setiap bagian–bagian memiliki tugasnya masing–masing. Berikut ini adalah *job description* dari masing- masing bagian:

1. Kepala Dinas
   a) Menyusun rencana program Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b) Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar perkerjaan berjalan lancar;
   c) Membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
   d) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program, sasaran ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
   e) Merumuskan kebijakan daerah bidang perencanaan pajak, bidang pajak pendaftaran, bidang pajak penetapan dan bidang pengendalian sebagai bahan penetapan kebijakan oleh pimpinan;
   f) Memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan pajak, pajak pendaftaran, pajak penetapan dan pengendalian sesuai rencana kegiatan;

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

g) Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota;

h) Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup pajak daerah;

i) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Pusat;

j) Menyusun Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak daerah sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan dan;

k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

2. Sekretariat

a) Menyusun program dan rencana kerja keskretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Menyusun rumusan kebijakan administratif keskretariatan Dinas;

c) Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasikan pengelolaan umum dan kepegawaian;

d) Melaksanakan pengkoordinasikan penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaran tugas bidang;

e) Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasikan pengelolaan keuangan;

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

f) Menyelenggarakan pengkoordinasikan, pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang–undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

Kernel for Word to PDF Demo

g) Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Dinas;

Kernel for Word to PDF Demo

h) Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

i) Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan keskretariatan;

Kernel for Word to PDF Demo

j) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Pusat;

k) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretriatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;

Kernel for Word to PDF Demo

l) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasilnya.

Kernel for Word to PDF Demo

3. Kepala Seksi Penetapan dan Pembukuan

a) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Penetapan dan Pembukuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Kernel for Word to PDF Demo

b) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yag telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien.

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

c) Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Penetapan dan Pembukuan;

Kernel for Word to PDF Demo

d) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penetapan dan Pembukuan;

e) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penetapan dan Pembukuan;

Kernel for Word to PDF Demo

f) Menganalisa data untuk bahan kajian Penetapan dan Pembukuan;

g) Melaksanakan Penetapan dan Pembukuan yang meliputi penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

h) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Penetapan dan Pembukuan oleh pimpinan;

Kernel for Word to PDF Demo

i) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Penetapan dan Pembukuan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan dan ;

Kernel for Word to PDF Demo

k) Melaksakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

4. Seksi Penagihan

a) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Penagihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Kernel for Word to PDF Demo

b) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien;

Kernel for Word to PDF Demo

c) Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan lingkup Penagihan;

Kernel for Word to PDF Demo

d) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penagihan;

e) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penagihan;

Kernel for Word to PDF Demo

f) Menganalisa data untuk bahan kajian Penagihan;

g) Melaksanakan pengusulan surat teguran, surat peringatan, dan surat sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak;

Kernel for Word to PDF Demo

h) Melaksanakan pengusulan keputusan pengurangan, keputusan restitusi, keputusan kompensasi, keputusan keringatan, keputusan pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak serta penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi;

Kernel for Word to PDF Demo

i) Melaksanakan pengusulan surat keberatan dan penghapusan piutang pajak;

Kernel for Word to PDF Demo

Kernel for Word to PDF Demo

j) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang pengusulan surat teguran, surat peringatan dan surat sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak oleh pimpinan;

Kernel for Word to PDF Demo

k) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

Kernel for Word to PDF Demo

l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Penagihan meliputi pengusulan surat teguran, surat peringatan dan surat sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan dan;

Kernel for Word to PDF Demo

m) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kernel for Word to PDF Demo

2.4 Aspek Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung merupakan suatu instansi yang melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pemungutan pajak daerah.Aspek – aspek kegiatan yang dilaksanakan oleh Disyanjak adalah:

Kernel for Word to PDF Demo

1. Menyiapkan, menyerahkan, menerima, dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame.

Kernel for Word to PDF Demo

2. Memungut pajak daerah berupa pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame.

Kernel for Word to PDF Demo

3. Melaksanakan kegiatan penetapan pajak bumi dan bangunan, pajak air tanah, dan pajak reklame.

Kernel for Word to PDF Demo